

**Analisis Potensi Pendapatan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan**

*Analysis of Potential Income Tax Areas in An Attempt to Increase
Revenue of The Original South Kalimantan*

Noorhidayanti

Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
noorhidayanti70@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the description of the tax area now and to find out how the tax potential of Regions in an attempt to increase Revenue of the original South Kalimantan.

The object of this research is in the province of South Kalimantan. The type of this research is quantitative, i.e., data-shaped figures or numbers. The data used in this research is secondary. The data in this study using the method of estimation is to figure out how significant the tax potential of regions of the province of South Kalimantan belongs to the Original income area.

The results of this research the potential tax areas of the province in the form of motor vehicle Taxation (PKB), the motor vehicle fuel tax (PBBKB), Customs Tax behind the name of motor vehicle Tax (PBBNKB), surface water (PAP) and taxes of cigarettes owned South Kalimantan very high against the original Revenue areas.

Keywords: *local tax Revenue and the original Area.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pajak daerah sekarang dan untuk mengetahui bagaimana potensi Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan.

Objek dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis dari penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan dalam penelitian ini menggunakan metode estimasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak daerah provinsi yang dimiliki Kalimantan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini potensi pajak daerah provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok yang dimiliki Kalimantan Selatan sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan tersebut membutuhkan pembangunan dengan prinsip berkelanjutan, mencakup semua bidang dan aspek kehidupan masyarakat. Hal ini membutuhkan keterlibatan seluruh komponen pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ketinggian pemerintahan desa. Secara khusus otonomi menjadi hal yang penting dan diharapkan dapat memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan daerah menjadi sesuatu yang amat penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berusaha untuk selalu mengoptimalkan pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sehubungan dengan hal ini PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar dalam struktur APBD. Berarti pemerintah daerah harus menggali segala potensi dan sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta dapat mengelolanya secara efisien dan efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Muhammad Saleh, (2014).

Dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali hanya didasarkan pada data historisnya, bukan didasarkan pada potensi yang sebenarnya dimiliki.

Bila suatu target PAD telah tercapai atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, belum tentu kinerja keuangan sudah dianggap bagus. Karena itu secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan potensinya untuk merealisasikan PAD yang bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pembangunan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksud agar daerah dapat mendanai otonomi daerah yang bersumber dari potensial daerahnya sendiri. Melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok adalah sumber Pendapatan yang sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah.

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak yang diberikan atas kepemilikan kendaraan bermotor .
Pokok wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang

- memiliki dan natau mempunyai kendaraan bermotor. Sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi, 1 persen untuk kendaraan bermotor angkutan umum, 0,5 persen untuk kendaraan bermotor sosial keagamaan, pemerintah/TNI/Polri dan pemerintah Daerah dan 0,2 persen untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
2. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**
Pajak yang diberikannakibat penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, atau terdapat kejadian khusus seperti penguasaan kendaraan bermotor lebih dari duabelas bulannsecara, maka dalam hukum sudah dianggap terjadi sebuah proses penyerahan, adanya kondisi seperti ini dalam hukum disebut sebagai perjanjian sewa beli. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Provinsi sebesar 10 persen untuk penyerahan pertama dan 1 persen untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
 3. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**
Pada pajak ini terdapat mekanisme yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis pajak pada umumnya, yaitu dimana pajak pemungut biasanya adalah pihak pajak atau pemerintah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 7,5 persen apabila terjadi perubahan tarif dilakukan pemerintah pusat, maka tarik sebgaimana dimaksud sebesar 7,5 persen disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah pusat.
 4. **Pajak Air Permukaan**
Pada pajak ini diberikan terhadap orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan atau dan pemanfaatan air permukaan. Terkecuali dari pengenaan pajak ini adalah pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 persen oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 5. **Pajak Rokok**
Pajak Rokok merupakan pajak baru di dalam pajak daerah. Pajak Rokok yaitu pajak yang diberikan kepada pengusaha pabrik rokok atau produsen rokok dan termasuk pula importir rokok. Tarif ypajak rokok yang ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setorannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self Assessment* yaitu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri wajib pajaknya. Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat diborongkan atau dalam artian bahwa seluruh proses pemungutan pajak tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga.

Bagi Hasil Pajak Daerah/ Provinsi

Bagi hasil pajak yang dihasilkan dari berbagai macam pajak daerah sebagian dikembalikan ke daerah masing-masing, dan sebagian di pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan penentuan yaitu, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/ kota sebesar 30 persen,

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ferry Susanawati tahun 2014 dalam skripsi dengan judul, “Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro”.
2. Penelitian oleh Firman Hadi Kusumo Yuwono tahun 2012 dalam skripsi dengan judul, “Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”.
3. Penelitian oleh Mario Hendry Wurangain tahun 2013 dalam skripsi dengan judul, “Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa”.

METODE PENELITIAN

Sumber dan jenis data dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan memberikan gambaran dan menganalisis data-data untuk mengerahui target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari instansi pemerintah seperti Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara mengajukan surat izin penelitian kepada instansi-instansi yang terkait dengan penulisan, dalam hal ini peneliti mengajukan surat izin kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan kemudian data tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis. Data penelitian diambil dari jumlah pendapatan pajak daerah provinsi dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

Variabel definisi operasional yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah yaitu diperoleh besarnya pendapatan dari pelayanan yang diberikan berhubungan dengan pelayanan terhadap Pajak Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan dan Pajak Rokok.
2. Pendapatan Asli Daerah
Penerimaan Daerah yang didapatkan secara langsung dari daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi-daerah, hasil pengelolaan yang dipisahnyang bersumber dari pajak daerah.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode estimasi yaitu metode dengan membuat scenario pertumbuhan rata-rata, pertumbuhan tinggi,

pertumbuhan sedang dan pertumbuhan rendah. Berikut pertumbuhan pajak dilihat dari rumus sebagai berikut :

$$r_i = \frac{\text{Pajak}_t - \text{Pajak}_{t-1}}{\text{Pajak}_{t-1}} \times 100\%$$

r_i = Pertumbuhan objek pajak pada tahun ke-i
 Pajak_t = Objek pajak pada tahun t
 Pajak_{t-1} = Objek pajak pada tahun t-1
 Melihat potensi pajak dengan cara estimasi :
 $Y = a \cdot bX + bX$
 Dimana :
 Y = Nilai Pajak
 a = Nilai Pertumbuhan
 b = Nilai pajak pada tahun t

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak Kendaraan Bermotor

Perkembangan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2009-2016 menunjukkan realisasi rata-rata capaian lebih dari 100%. Rata-rata capaiannya sebesar 107,50%. Pada tahun 2010 realisasi capaian hanya sebesar 97,90 %, kemudian tahun 2012 sebesar 91,56 %, dan tahun 2013 sebesar 98,87 %. Akan tetapi untuk tahun 2014 meningkat sebesar 104,489% dan pada tahun 2015 menurun sebesar 73,30% karena adanya pemberlakuan pajak progresif, dan kembali meningkat pesat pada tahun 2017 sebesar 183,32%, angka capaian realisasi penerimaan PKB diatas 100 %. Dilihat dari tabel pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 ke 2016 yaitu sebesar 43,12 % dan pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2014 ke 2015 sebesar -25,10 %. Terjadinya penurunan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 dikarenakan terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor (ranmor) baru roda dua di Kalimantan Selatan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Penjualan kendaraan bermotor (ranmor) roda empat juga mengalami penurunan penjualan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.

Berdasarkan data secara totalitas pada tahun 2015 terjadi pula pertumbuhan negatif jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2009-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Capaian (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	225.795.143.000,00	236.557.126.923,00	104,77	
2010	295.861.000.000,00	289.645.756.507,19	97,90	22,44
2011	340.961.000.000,00	360.798.845.280,00	105,82	24,56
2012	472.630.000.000,00	432.725.926.559,00	91,56	20,21
2013	489.421.615.000,00	483.907.804.646,00	98,87	11,83
2014	522.000.000.000,00	547.521.576.570,00	104,489	13,14

2015	549.475.542.000,00	410.098.327.052,00	73,30	-25,10
2016	568.874.872.000,00	586.929.751.685,00	183,32	43,12
Rata-rata	433.127.396.500,00	418.523.139.402,77	107,50	15,74

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan, 2018

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Perkembangan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bahan Bakar Bermotor (PKBKB) di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2009-2016 menunjukkan realisasi rata-rata capaian lebih dari 100%. Rata-rata capaiannya sebesar 106,91%, pada tahun 2013 penerimaan pajak bahan bakar terbanyak sebesar Rp.1.149.241.938.009,50, tahun 2009 penerimaan pajaknya paling sedikit yaitu sebesar Rp. 358.156.914.070,00. Pertumbuhan pajak terendah terjadi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu sebesar -43,45 % dan pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2010 ke 2011 sebesar 78,99 %. Penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sangat dipengaruhi antara lain berapa besaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Selatan. Penurunan konsumsi solar pada bahan bakar kendaraan bermotor terjadi dikarenakan berkurangnya kegiatan eksplorasi/eksploitasi di sector industri pertambangan sebagai dampak atas turunnya harga batu bara di pasaran dunia. Turunnya harga minyak dunia semakin menekan sisi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kenndaraan Bermotor pada tahun 2015.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2009	320.000.000.000,00	358.156.914.070,00	111,92	
2010	398.667.281.659,00	428.596.868.260,00	107,51	19,67
2011	418.616.000.000,00	767.161.313.983,00	183,26	78,99
2012	1.017.848.452.632,00	1.217.906.497.252,00	119,65	58,75
2013	1.308.779.258.000,00	1.149.241.938.009,50	87,81	-5,63
2014	1.376.000.000.000,00	1.247.840.329.457,00	90,685	8,57
2015	1.178.725.511.000,00	705.652.627.037,00	59,866	-43,45
2016	769.191.000.000,00	727.760.645.003,45	94,61	3,13
Rata-rata	848.478.437.911,37	825.289.641.633,94	106,91	17,15

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Perkembangan target dan realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2009-2016 menunjukkan realisasi rata-rata capaian kurang dari 100%. Rata-rata capaiannya sebesar 92,55%. Tahun 2009 realisasi capaian yang paling rendah dari tahun yang lain yaitu sebesar Rp.235.789.409.407, kemudian tahun 2012 realisasi penerimaan terbesar yaitu sebesar Rp 546.704.049.371, dan tahun 2016 realisasi penerimaannya sebesar Rp. 345.919.361.485. Menurunnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan dikarenakan banyak masyarakat lebih memilih kendaraan dari Jakarta. Penyebab lain yaitu masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya. Berdasarkan rata-rata Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor (ranmor) baru roda dua di Kalimantan Selatan. Menurunnya pembelian kendaraan bermotor berdampak pada pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Pada pajak Bea Balik Nama pertumbuhan tertinggi pajak yaitu pada tahun 2009 ke 2010 yaitu sebesar 55,62 % sedangkan pertumbuhan terendahnya terjadi pada tahun 2014 ke 2015 sebesar -40,29 %. Penurunan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena diberlakukannya pajak progresif terhadap pajak Bea Balik Nama Kendaraan. Diberlakukannya pajak progresif mengakibatkan pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurun drastis karena masyarakat lebih memilih memindahkan kepemilikan kendaraan bermotornya ke daerah lain, seperti ke Kalimantan Tengah maupun ke Kalimantan Timur.

Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan
2009	245.000.000.000,00	235.789.409.407,00	96,24	
2010	300.000.000.000,00	366.939.566.387,14	122,31	55,62
2011	462.930.000.000,00	513.279.853.440,00	110,88	39,88
2012	526.186.000.000,00	546.704.049.371,00	103,90	6,51
2013	549.102.419.000,00	501.785.762.200,00	91,38	-8,21
2014	513.975.000.000,00	485.571.070.722,00	94,279	-3,23
2015	449.000.138.693,00	289.930.328.515,00	64,553	-40,29
2016	356.257.390.000,00	345.919.361.485,00	56,85	19,31
Rata-rata	425.306.368.461,62	410.865.050.190,89	92,55	9,79

Sumber :Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Pajak Air Permukaan

Perkembangan target dan realisasi Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2009-2016 menunjukkan realisasi rata-rata capaian lebih dari 100%. Rata-rata capaiannya sebesar 105,96%. Tahun 2010 realisasi capaian sebesar 124,01 %, kemudian tahun 2012 sebesar 99,33%, dan tahun 2013 meningkat sebesar

98,30%. Tahun 2015 menurun drastis sebesar 57,24% dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 85,97%. Dilihat dari tabel pertumbuhan Pajak Air permukaan tertinggi terjadi pada tahun 2015 ke 2016 yaitu sebesar 65,62 %. Pertumbuhan terendah Pajak Air Permukaan terjadi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu sebesar -46,06.

Tabel 4
Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2009		2.007.614.320,00	91,26	
	2.200.000.000,00			
2010	2.300.000.000,00	2.852.173.204,00	124,01	4,20
2011	1.500.000.000,00	2.273.482.304,00	151,57	-20,28
2012	2.272.800.000,00	2.257.556.341,00	99,33	-0,70
2013	1.981.163.000,00	1.947.483.958,00	98,30	-13,73
2014	2.000.000.000,00	2.794.487.716,00	140	43,49
2015	2.633.735.000,00	1.507.455.956,00	57,236	-46,06
2016	2.681.500.000,00	2.496.666.484,00	85,97	65,62
Rata-rata	2.196.149.750,00	2.267.115.035,37	105,96	4,65

Sumber : Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Pajak Rokok

Perkembangan target dan realisasi Pajak Rokok di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2014-2016 menunjukkan realisasi rata-rata capaian kurang dari 100%. Pajak rokok yang baru diberlakukan pada tahun 2014 ini rata-rata capaiannya sebesar 89,72%. Tahun 2014 realisasi capaian hanya sebesar 79,99 %, kemudian tahun 2015 meningkat sebesar 87,73%, dan tahun 2016 meningkat lagi sebesar 101,44%. Dilihat dari perkembangan pajak rokok tertinggi terjadi pada tahun 2015 ke 2016 sebesar 76,26 % dan terendahnya yaitu pada tahun 2014 ke 2015.

Tabel 5
Target dan Realisasi Pajak Rokok
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2014	141.515.000.000,00	113.198.041.815,00	79,990	
2015	171.910.534.000,00	116.431.221.239,00	87,728	2,86
2016	204.319.902.000,00	205.221.519.473,00	101,44	76,26
Rata-rata	172.581.812.000,00	144.950.260.84233	89.719	39,56

Sumber :Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan,2018

Estimasi Pajak Daerah Provinsi

Penetapan target,diperlukan data tentang potensi dari objek agar realisasi yang akan dicapai sesuai atau mendekati kondisi yang sebenarnya.Untuk menghitung potensi Pajak Provinsi digunakan 3 skenario pertumbuhan yaitu : tinggi (maksimum),sedang (medium) dan rendah (minimum).

Hasil estimasi Potensi Pajak Provinsi berdasarkan rata-rata masin-masing objek pajak selama 6 tahun (2017-2023).

Estimasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 6
Estimasi Potensi Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017-2023

No	Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan (Rp)	Maksimum Pertumbuhan (Rp)	Medium Pertumbuhan (Rp)	Minimum Pertumbuhan (Rp)
1	2017	679.312.494.600, 22	840.013.860.611,5 7	705.548.254.500, 54	439.610.384.012 ,07
2	2018	786.236.281.250, 29	1.202.227.837.307 ,28	848.139.556.735, 10	329.268.177.625 ,04
3	2019	909.989.871.919, 09	1.720.628.480.754 ,18	1.019.548.561.15 1,26	246.621.865.041 ,15
4	2020	1.053.222.277.75 9,15	2.462.563.481.655 ,39	1.225.599.325.35 9,93	184.719.776.915 ,82
5	2021	1.218.999.464.27 8,45	3.524.420.854.945 ,19	1.473.292.949.01 5,17	138.555.112.909 ,95
6	2022	1.410.868.979.95 5,87	5.044.151.127.579 ,55	1.771.045.454.01 1,14	103.627.979.569 ,55
7	2023	1.632.940.914.80 0,93	7.219.189.093.817 ,62	2.218.973.740.22 6,79	77.617.356.697, 60

Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 1

Estimasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 ke 2023 dibagi menjadi 4 yaitu menghitung dengan cara rata-rata pertumbuhan yang dimana rata-rata pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 15,74 %. Estimasi yang kedua yaitu menghitung dengan cara pertumbuhan tertinggi (maksimum) PKB, pertumbuhan maksimum Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 43,12 %. Estimasi PKB yang ketiga yaitu menghitung dengan cara pertumbuhan sedang (medium) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 20,21 %. Cara yang terakhir yaitu dengan menghitung pertumbuhan rendah dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar – 25,10 %. Dari tabel kita bisa melihat gambaran potensi pendapatan pajak di tahun yang mendatang. Perkiraan pertumbuhan rata-rata, maksimum, medium dan minimum disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila

pertumbuhan ekonomi tinggi kita bisa memakai skenario pertumbuhan yang maksimum, apabila rendah bisa memakai scenario pertumbuhan minimum.

Estimasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tabel 7

**Estimasi Potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 Provinsi Kalimantan Selatan
 Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan (Rp)	Maksimum Pertumbuhan (Rp)	Medium Pertumbuhan (Rp)	Minimum Pertumbuhan (Rp)
1	2017	379.784.866.974,38	1.302.618.778.491,68	790.129.732.280,25	411.548.644.749,45
2	2018	416.965.805.451,17	2.331.557.351.622,25	857.843.850.336,66	232.730.758.605,82
3	2019	457.786.757.804,84	4.173.254.503.668,66	931.361.068.310,52	131.609.243.991,59
4	2020	502.604.081.393,94	7.469.708.236.116,54	1.011.178.711.864,73	74.425.027.477,24
5	2021	551.809.020.962,40	13.370.030.771.825,00	1.097.836.727.471,53	42.087.353.038,38
6	2022	605.831.124.114,62	23.931.018.078.489,60	1.191.921.335015,84	23.800.398.143,20
7	2023	665.141.991.165,45	42.834.129.258.688,50	1.294.068.993.426,70	13.459.125.149,98

Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 2

Estimasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 ke 2023 dibagi menjadi 4 yaitu menghitung dengan cara rata-rata pertumbuhan yang dimana rata-rata pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 17,15 %. Estimasi yang kedua yaitu menghitung dengan cara pertumbuhan tertinggi (maksimum) PBBKB, pertumbuhan maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 78,99 %. Estimasi PBBKB yang ketiga yaitu menghitung dengan cara pertumbuhan sedang (medium) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 8,57 %. Cara estimasi yang keempat yaitu dengan cara pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar -43,45 % Dari tabel kita bisa melihat gambaran potensi pendapatan pajak di tahun yang mendatang. Skenario pertumbuhan rata-rata, maksimum, medium dan minimum disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan inflasi. Pada skenario pertumbuhan rendah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak bisa dipakai dikarenakan minusnya terlalu besar.

Estimasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 8

**Estimasi Potensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 Provinsi Kalimantan Selatan
 Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan (Rp)	Maksimum Pertumbuhan (Rp)	Medium Pertumbuhan (Rp)	Minimum Pertumbuhan (Rp)
----	-------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1	2017	852.571.595.621,54	538.319.710.342,96	368.438.711.917,67	206.548.450.742,69
2	2018	998.787.624.270,64	837.733.133.235,71	392.424.072.063,51	123.330.079.938,46
3	2019	1.170.079.701.833,05	1.303.680.301.941,41	417.970.879.154,85	73.640.390.73,26
4	2020	1.370.748.370.697,42	2.028.787.285.881,22	445.180.783.387,83	43.970.677.305,63
5	2021	1.605.831.716.272,03	3.157.198.774.288,36	474.162.052.386,38	26.254.891.419,19
6	2022	1.881.231.855.612,68	4.913.232.732.547,55	505.030.001.996,73	15.676.795.666,40
7	2023	2.203.863.118.850,25	7.645.972.778.390,50	537.907.455.126,72	9.360.614.692,41

Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 3

Estimasi Potensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan dihitung dengan empat cara yaitu yang pertama dengan mengestimasi pertumbuhan rata-ratanya. Pertumbuhan rata-rata Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 9,79 %. Estimasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan yang kedua yaitu dengan menghitung Pertumbuhan maksimumnya (tertinggi), pertumbuhan PBBNKB yang tertinggi yaitu sebesar 55,62 %, cara yang ketiga yaitu dengan menghitung dari pertumbuhan medium (sedang) PBBNKB sebesar 6,51 %. Yang terakhir yaitu dengan cara dari pertumbuhan terendah (minimum) sebesar -0,70 %.

Estimasi Pajak Air Permukaan

Tabel 9
Estimasi Potensi Pajak Air Permukaan
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017-2023

N	Tahu	Rata-Rata	Maksimum	Medium	Minimum
o	n	Pertumbuhan	Pertumbuhan	Pertumbuhan	Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2017	2.612.761.475,5 1	4.134.979.030,80	2.479.189.818,6 1	1.346.701.901,4 7
2	2018	2.734.254.884,1 2	6.848.352.270,81	2.461.835.489,8 8	726.411.005,65
3	2019	2.861.397.736,2 3	11.342.241.030,9 2	2.444.602.641,4 5	391.826.096,45
4	2020	2.944.452.730,9 6	18.785.019.595,4 1	2.427.490.422,9 6	211,350.996,42
5	2021	3.133.694.782,9 5	31.111.749.435,9 2	2.410.497.990,0 0	114.002.727,74
6	2022	3.279.411.590,3 6	51.527.279.445,5 8	2.393.624.504,0 7	61.493.071,20
7	2023	3.431.904.229,3 1	85.339.480.217,7 6	2.376.869.132,5 4	33.169.362,60

Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 4

Estimasi Pajak Air Permukaan yang pertama dihitung dengan cara dari pertumbuhan rata-rata Pajak Air Permukaan sebesar 4,65 %. Estimasi kedua menghitung dari pertumbuhan maksimum (tertinggi) PAP. Estimasi ketiga dengan menghitung

pertumbuhan medium (sedang) PAP sebesar -0,70 %. Terakhir menghitung dari pertumbuhan terendahnya (minimum) dari Pajak Air Permukaan yaitu sebesar -46,06 %. Kendala Pajak Air Permukaan yaitu karena kurangnya kesadaran perusahaan atau badan yang memakai pajak air permukaan ke pemerintah.

Estimasi Pajak Rokok

Tabel 10
Estimasi Potensi Pajak Rokok
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017-2023

No	Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan (Rp)	Maksimum Pertumbuhan (Rp)	Medium Pertumbuhan (Rp)	Minimum Pertumbuhan (Rp)
1	2017	286.407.152.576,52	361.723.450.223,11	286.407.152.576,52	211.090.854.929,93
2	2018	399.709.822.135,79	637.573.753.363,25	399.709.822.135,79	217.128.053.380,92
3	2019	557.835.027.772,71	1.123.787.497.678,07	557.835.027.772,71	223.337.915.707,62
4	2020	778.514.564.759,59	1.980.787.843.407,37	778.514.564.759,59	229.725.380.096,86
5	2021	1.086.494.926.578,49	3.491.336.652.789,82	1.086.494.926.78,49	236.295.525.967,63
6	2022	1.516.312.319.532,93	6.153.829.984.207,34	1.516.312.319.532,93	243.053.578.010,30
7	2023	2.116.165.473.140,16	10.846.740.730.163,90	2.116.165.473.140,16	250.004.910.341,40

Sumber : Hasil Perhitungan Dari Tabel 5

Estimasi Pajak Rokok dengan menghitung dari rata-rata pertumbuhan Pajak Rokok, rata-rata pertumbuhan pajak rokok sebesar 39,56 %. Estimasi yang kedua yaitu menghitung dengan cara dari pertumbuhan maksimum Pajak rokok yaitu sebesar 39,56 %. Estimasi ketiga dengan cara menghitung dari pertumbuhan medium (sedang) Pajak Rokok sebesar 39,56. Estimasi terakhir yaitu dengan dengan cara menghitung dari pertumbuhan terendah Pajak Rokok sebesar 2,86 %. Pajak Rokok yang baru tahun 2014 ini dibelakangan sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan terbukti dari tahun 2014 ke 2016 realisasi pajak rokok terus mengalami peningkatan.

Telah dilakukan pengujian dengan cara Estimasi Potensi Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Air Perumkaan (PAP), dan Pajak Rokok (PR) untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bisa dilihat estimasi dengan rata-rata pertumbuhan pajak, dengan skenario tinggi (maksimum) pertumbuhan pajak , skenario sedang (medium) pertumbuhan pajak , dan skenario rendah (minimum) pertumbuhan pajak .

Pembahasan Hasil Penelitian

Telah dilakukan beberapa pengujian dengan estimasi Pajak Daerah Provinsi denganskenario pertumbuhan tinggi (maksimum),sedang (medium) dan rendah (minimum).Terlihat dari estimasi diatas pemerintah dapat memaksimalkan target pajak daerah provinsi baik itu pajak kendaraan bermotor (PKB),Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok di tahun-tahun mendatang. Skenario pertumbuhan tinggi

(maksimum), sedang (medium) dan rendah (minimum) bisa dipakai disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, pendapatan masyarakat, dan laju inflasi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan masalah yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, gambaran Pajak Daerah yang sekarang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan yaitu Pajak Daerah yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok cenderung meningkat terus tiap tahunnya hanya rata-rata pada tahun 2015. Penerimaan Pajak Provinsi seluruhnya mengalami penurunan, yang disebabkan adanya pemberlakuan pajak progresif, kurangnya laporan oleh wajib pajak tentang pajaknya, potensi Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Selatan setelah dilakukan cara estimasi terhadap pajak-pajak provinsi untuk mengetahui seberapa besar pajak yang bisa didapatkan oleh pemerintah, dari estimasi tersebut dilihat potensi pajak dengan rata-rata pertumbuhan, pertumbuhan tinggi, pertumbuhan sedang dan pertumbuhan rendah. Dalam suatu penelitian, pasti mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang membuat penelitian ini tidak bisa sempurna semua. Dalam penelitian ini yang membuat penelitian ini tidak begitu sempurna adalah susahnya mencari data. Untuk mencari potensi pajak yang sempurna seharusnya dilakukan uji petik tetapi karena keterbatasan waktu penelitian tidak bisa dilakukan. Tetapi peneliti berusaha semaksimal mungkin melakukan penelitian ini dengan teliti dan baik.

REFERENSI

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, (2018). *Target dan Realisasi Pajak Daerah Dalam Angka Tahun 2009-2016*. Kalimantan Selatan. Badan Keuangan Daerah.

Ferry, Susanawati .(2014). *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro*.

Firman, Hadi Kusumo Yuwono. (2012). *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Penerimaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*.

Marihot P Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Saleh, Muhamad.(2014). *Keuangan Daerah*. Banjarmasin